

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah produksi barang dan jasa yang diproduksi suatu negara mengalami peningkatan. Dalam dunia nyata, amat sulit mencatat jumlah unit barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu. Kesulitan itu muncul bukan saja karena jenis barang dan jasa yang dihasilkan sangat beragam, tetapi satuan ukurannya pun berbeda.

Untuk mengukur tingkat produksi nasional yang dihasilkan suatu negara, maka angka yang digunakan untuk menaksir perubahan *output* adalah dengan menghitung nilai moneternya (uang) yang tercermin dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDB yang digunakan adalah PDB berdasarkan harga konstan. Sebab, dengan menggunakan harga konstan, pengaruh perubahan harga (inflasi) telah dihilangkan, sehingga sekalipun angka yang muncul adalah nilai uang dari total *output* barang dan jasa, perubahan PDB sekaligus menunjukkan perubahan jumlah kualitas barang dan jasa yang dihasilkan selama periode pengamatan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*.(Banten: Baraka Aksara,2013) h.62-63

Negara bisa melaksanakan pembangunan, salah satunya adalah mengundang masuknya investor dari luar. Artinya negara harus mampu mendorong terciptanya iklim investasi yang diinginkan. Dan dari peningkatan investasi tersebut diharapkan bisa mendorong pada penciptaan masyarakat yang lebih sejahtera. Karena secara realita terjelaskan jika investasi meningkat maka lapangan pekerjaan akan meningkat, peningkatan lapangan pekerjaan akan mampu memperkecil angka kemiskinan termasuk bisa meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Dengan kondisi angka kemiskinan yang kecil dan pengangguran menurun, ini bisa menyebabkan tujuan-tujuan politik bisa dijalankan secara baik dan terfokus.<sup>2</sup>

Peranan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan terutama di negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga bekas jajahan harus benar-benar aktif dan positif. Karena pemerintah harus mempunyai sasaran utama bagi rakyatnya terutama yang berkenaan dengan upaya meningkatkan tingkat taraf hidup atau tingkat kemakmuran rakyatnya. Apalagi pemerintah mempunyai sumber daya alam yang banyak dan bernilai tinggi. Karenanya penjajah melakukan penjajahan di banyak negara terbelakang yang kaya akan sumber daya alamnya.

---

<sup>2</sup>Irham Fahmi, *Ekonomi Politik Teori dan Realita*, (Bandung, Alfabeta cv: 2013) h.128

Dalam zaman yang segalanya serba global, peranan pemerintah untuk melakukan pembangunan ekonomi khususnya merupakan kunci menuju masyarakat yang lebih makmur. Bahkan diharapkan pada waktunya bisa negara maju atau industri. Masalah negara terbelakang atau negara berkembang begitu besarnya dan masalah itu tidak bisa diserahkan begitu saja pada mekanisme bebas kekuatan-kekuatan ekonomi. Oleh karena itu dalam upaya menyeimbangkan pertumbuhan berbagai sektor perekonomian hingga penawaran harus sesuai dengan permintaan. Untuk itu dibutuhkan pengawasan dan pengaturan oleh negara atau pemerintah dalam upaya mencapai pertumbuhan yang seimbang. Karena keseimbangan membutuhkan suatu pengawasan terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi komoditas. Untuk itu pemerintah harus mampu membuat suatu rencana pengawasan fisik serta langkah-langkah fiskal dan moneter yang perlu dilakukan. Langkah-langkah tersebut tidak dapat dihindarkan dalam upaya mengurangi ketidak seimbangan ekonomi dan sosial yang mengancam negara berkembang. Mengatasi perbedaan sosial dan menciptakan psikologis, ideologis, sosial dan politik yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi menjadi tugas terpenting pemerintah.<sup>3</sup> Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan sebuah penelitian pada sebuah kantor di

---

<sup>3</sup>Bachrawi Sanusi, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta, Rineka Cipta: 2004) h.74-75

Provinsi Banten dengan judul “*Analisis Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Banten Tahun 2007-2014*”

## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam menghadapi tantangan-tantangan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang kian hari kian meningkat maka penulis dapat mengidentifikasi adanya masalah-masalah yang diambil dari latar belakang yaitu:

1. Kurangnya jumlah produksi barang dan jasa di dalam sebuah negara sehingga harus mengimpor dari negara lain.
2. Sedikitnya investor untuk berinvestasi menyebabkan penghambatnya pertumbuhan ekonomi.
3. Kurangnya lapangan pekerjaan sehingga menyebabkan banyaknya pengangguran.

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan diantaranya yaitu:

1. Bagaimana Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Banten ?
2. Seberapa besar Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Banten ?

#### **D. Batasan Masalah**

Dalam pembahasan masalah ini, penulis memberikan batasan masalah-masalah yang ada pada penelitian ini, diantaranya yaitu membahas tentang Analisis pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Banten tahun 2007-2014.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang menjadi kerangka acuan, maka tujuan dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Banten
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Banten

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya tentang analisis pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Banten
2. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi penganbang ilmu ekonomi Islam pada umumnya dan serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang analisis pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Banten

3. Sebagai sarana bagi penulis untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1) pada Jurusan Ekonomi

## **G. Kerangka Pemikiran**

Keinginan membentuk negara dengan tingkat kemakmuran yang mencukupi dan sejahtera lahir serta batin adalah cita-cita ideal dari setiap pemerintah di setiap negara. Karena terwujudnya keinginan ideal tersebut akan menempatkan negara tersebut memiliki daya saing serta disegani oleh berbagai negara. Tidak terkecuali negara Indonesia, terus berbenah secara sistematis melakukan perubahan di berbagai lini termasuk membentuk terselenggaranya pemerintahan yang berfungsi untuk menciptakan kesejahteraan bersama.<sup>4</sup> Ada beberapa pendapat mengenai pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi diantaranya:

Menurut Friedrich List, pertumbuhan ekonomi sebenarnya bergantung kepada peranan pemerintah, organisasi-organisasi swasta, entrepreneur, dan kebudayaan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi hanya terjadi apabila dalam masyarakat terdapat kebebasan dalam organisasi politik dan perseorangan.

Adapun menurut Karl Bucher menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah melalui 3(tiga) tingkat, yaitu:

---

<sup>4</sup>Irham Fahmi, *Ekonomi Politik Teori dan Realita...* h.129

1. Produksi untuk kebutuhan sendiri
2. Perekonomian kota, dimana pertukaran sudah meluas
3. Perekonomian nasional dimana peranan pedagang-pedagang tampak semakin penting.

Sedangkan W.W.Rostow dalam bukunya “The Stages of Economic Growth” mengemukakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi dapat dibedakan dalam lima tahap dan setiap negara di dunia dapat digolongkan ke dalam salah satu tahap dari lima tahap pertumbuhan ekonomi tersebut. Rostow membuat penggolongan tahap-tahap pertumbuhan ekonomi berdasarkan pada ciri-ciri perubahan keadaan ekonomi, politik dan sosial yang berlaku serta transportasi suatu masyarakat tradisional menjadi suatu masyarakat modern.<sup>5</sup>

Dari pemaparan tersebut bahwa dapat disimpulkan hubungan dari penjelasan tersebut yaitu (-) dimana pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. pengeluaran pemerintah naik akan tetapi pertumbuhan ekonomi kadang-kadang bisa mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan, penulisan ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bab atau bagian yaitu:

---

<sup>5</sup> Subandi, Sistem Ekonomi Indonesia (Bandung; Alfabeta, 2009) h.30-31

BAB I Pendahuluan, membahas : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II Kajian Teoritis, membahas : Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), Penelitian Terdahulu, Hipotesis

BAB III Metode Penelitian, yang terdiri dari : Ruang Lingkup Penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis Metode Penelitian, Variabel Penelitian, Tehnik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian, Teknik Pengolahan Data, Teknik Analisis Data, Alur Penelitian.

BAB IV Pembahasan Hasil Penelitian, menyajikan hasil dari penelitian yaitu: Gambaran Umum Objek Penelitian, Pembahasan Hasil Penelitian.

BAB V Penutup, menyajikan: Kesimpulan dan Saran-saran dari hasil penelitian yang diteliti.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Pengeluaran Pemerintah**

##### **1. Pengertian Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.<sup>6</sup> Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Kelima penyebab yang dimaksud adalah: 1) Tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan; 2) Kenaikan tingkat pendapatan masyarakat; 3) Urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi; 4) Perkembangan demokrasi; dan 5) Ketidak efisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan.<sup>7</sup>

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan *agregat*. Pemerintah tidak hanya melakukan pengeluaran akan tetapi juga boleh melakukan penerimaan. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah diliputi dalam suatu konsep terpadu mengenai pendapatan dan belanja negara. Kebijakan-kebijaksanaan yang berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah (pendapatan dan belanja negara) disebut kebijakan fiskal.<sup>8</sup> Pengeluaran ini digunakan untuk menyediakan

---

<sup>6</sup> Tommy Prio Haryanto, Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011(*Jurnal ekonomi pembangunan*),EDAJ 2

<sup>7</sup>Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga:1996).h.162

<sup>8</sup>Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga:1996).h.157

fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah, dan pengeluaran untuk pengembangan infrastruktur dibuat untuk kepentingan masyarakat.

Pengeluaran Pemerintah dilihat dari Belanja Tidak Langsung. Pengeluaran pemerintah yang dilihat dari belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak digunakan secara langsung oleh adanya program atau kegiatan, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja pemeliharaan. Anggaran belanja tidak langsung memegang peran penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintah serta upaya peningkatan efisiensi dan produktifitas yang pada gilirannya akan tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga.

Pengeluaran pemerintah dilihat dari Belanja Langsung, Pengeluaran pemerintah yang dilihat dari belanja langsung adalah belanja yang digunakan oleh adanya program dan kegiatan yang direncanakan. Belanja langsung ini merupakan pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik dan non fisik. Pengeluaran pembangunan daerah ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi. Belanja langsung yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah total belanja langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.<sup>9</sup>

Belanja pemerintah meliputi pengeluaran untuk barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Belanja pemerintah mencakup upah pegawai negeri dan pengeluaran untuk pekerjaan umum. Arti dari belanja pemerintah perlu diperjelas. Apabila pemerintah membayar upah seorang jenderal, upah tersebut merupakan bagian dari belanja pemerintah. Namun, bagaimana jika pemerintah membayar uang pensiun bagi warga lanjut usia? Pengeluaran pemerintah seperti itu disebut dengan *pembayaran transfer* karena tidak untuk ditukar dengan barang atau jasa yang diproduksi pada saat itu. Pembayaran transfer memengaruhi pendapatan rumah tangga, namun tidak mencerminkan produksi ekonomi. (dari sudut pandang ekonomi makro, pembayaran transfer sama seperti pajak negatif.) karena PDB bertujuan untuk mengukur pendapatan dan pengeluaran untuk produksi barang dan jasa, pembayaran transfer tidak dihitung sebagai bagian dari belanja pemerintah.<sup>10</sup>

Selain mensejahterakan masyarakat salah satu dari tujuan pengeluaran pemerintah adalah untuk menjamin barang dan jasa dapat disediakan kepada masyarakat dengan harga yang murah, tetapi dengan tanpa mengurangi efisiensi pelayanannya. Tujuan lain pemerintah untuk menyertai secara langsung kegiatan perekonomian yaitu untuk menyeimbangkan pembangunan di

---

<sup>9</sup>Tommy Prio Haryanto, Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011(*Jurnal ekonomi pembangunan*),EDAJ 2 (3) (2013)

<sup>10</sup>N. Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Makro*,( Jakarta: Salemba Empat, 2014). h.11

antara berbagai golongan masyarakat, berbagai sektor ekonomi atau berbagai wilayah.<sup>11</sup>

## 2. Jenis-Jenis Anggaran

Dalam negara modern sekuler, pada umumnya anggaran terdiri dari dua jenis, yakni anggaran rutin (*current budget*) dan anggaran pembangunan (*capital budget*). *Current budget* disiapkan untuk membiayai pengeluaran rutin administrasi pemerintah, pertahanan negara, pengembalian utang dan pengeluaran-pengeluaran lain yang memiliki sifat rutin. *Capital budget* disiapkan untuk membiayai pengeluaran jangka panjang seperti bangunan prasarana, lembaga pendidikan dan fasilitas kesehatan, telekomunikasi, proyek-proyek pertahanan negara, bendungan, kanal, stasiun tenaga listrik, jalan raya, rel kereta api, dan sebagainya.<sup>12</sup>

Dalam Al-Qur'an (9:60) telah menentukan prinsip-prinsip yang mengatur *budget* pembiayaan negara di dalam Islam, Allah berfirman:

*“sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah,*

---

<sup>11</sup> Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) h.416

<sup>12</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).h.274-276

*dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana (QS At-Taubah[9]:60)*<sup>13</sup>

Anggaran sebuah negara dalam Islam agak berbeda, seluruh penerimaan dari zakat, *'usyr* dan sedekah ditransfer ke baitulmal (kas negara) untuk membiayai pengeluaran bagi kesejahteraan orang-orang fakir dan miskin, sedangkan penerimaan lain serta sumber-sumber bukan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran administrasi pemerintahan, proyek-proyek pembangunan ekonomi, pembayaran utang negara dan hal-hal lain yang memiliki karakteristik penerimaan dan modal.<sup>14</sup>

### **3. Sistem Anggaran**

Bagi sebagian besar masyarakat, anggaran negara masih tetap berupa misteri. Pada tingkat daerah, gejala ketertutupan terhadap informasi anggaran di daerah bukanlah merupakan hal baru, dokumen politik anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dianggap merupakan hak para elite penguasa ( eksekutif dan legislatif ), dan sedikit sektor swasta yang amat dekat dengan kekuasaan.<sup>15</sup>

Sistem penganggaran yang dipakai di dalam negara Islam adalah estimasi penerimaan yang wajar dari semua sumber negara dipersiapkan dengan hati-hati lalu kemudian didistribusikan bagi berbagai kategori pengeluaran. Dengan kata lain, basis penganggaran di negara Islam adalah penerimaan, baru kemudian

---

<sup>13</sup> Oom Mukarromah dan Badrudin, *Politik Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).h.49

<sup>14</sup>Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).h.278

<sup>15</sup>Bustanul Arifin, *Formasi Strategi Makro-Mikro Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).h.45

dialokasikan untuk pengeluaran. Pengeluaran ditetapkan mengikuti jumlah penerimaan yang didapat dari pajak dan sumber lain.

Islam adalah agama pertengahan. Dalam melakukan pengeluaran, Al-Qur'an mengutuk kekikiran maupun keborosan, dan yang diajarkan adalah pengeluaran moderat. Al-Qur'an menyatakan : *“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan menyesal”* (QS. Al-israa' [17]: 29). Dalam ayat lain, Al-Qur'an juga menyatakan: *“Dan orang-orang dan apabila membelanjakan (harta) mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”* (QS. Al-Furqaan [25]:67).

Perinsip-perinsip yang digariskan oleh Al-Qur'an mengenai pertengahan dalam pengeluaran hendaknya dipelajari dengan baik selagi mempersiapkan estimasi pengeluaran negara pada waktu menyusun anggaran.

#### **4. Prinsip-Prinsip Pengeluaran**

Prinsip-prinsip pengeluaran negaraberikut ini dibuat oleh *Majallah*, yakni Undang-undang kenegaraan (Kekhalifahan) Utsmaniyah, yang didasarkan pada *Fiqh Sunni*.

1. Kriteria utama bagi seluruh alokasi pengeluaran adalah kesejahteraan rakyat.
2. Kepentingan penduduk mayoritas haruslah didahulukan dibandingkan dengan kepentingan penduduk minoritas.
3. Menghilangkan kesulitan haruslah lebih diutamakan daripada mendapatkan kemudahan dan kenyamanan.
4. Pengorbanan atau kerugian pribadi dapat dibenarkan demi menyelamatkan pengorbanan atau kerugian publik, dan

pengorbanan atau kerugian yang lebih besar harus dapat dihindari dengan memberikan pengorbanan atau kerugian yang lebih kecil.

5. Barang siapa menerima manfaat harus menanggung biaya.

Kelima prinsip di atas haruslah dengan ketat ditaati ketika menyusun alokasi pengeluaran untuk berbagai sektor dan sasaran pengeluaran. Aturan nomor 2,3,4 dan 5 dapat juga diterapkan kepada perpajakan.<sup>16</sup>

## **5. Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal terwujud dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Belanja negara dalam APBN ditunjukkan dengan belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin berkaitan dengan belanja yang sifatnya tetap dan untuk menjalankan roda pemerintahan secara normal, termasuk di dalamnya antara lain untuk kebutuhan membayar gaji pegawai. Sedangkan belanja pembangunan merupakan sebuah komponen anggaran dalam pembangunan tertentu, misalnya dalam meningkatkan pelayanan publik, seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, penyediaan air bersih, pelabuhan, pasar, dan sebagainya.<sup>17</sup>

Kebijakan fiskal atau kebijaksanaan yang berhubungan dengan pajak adalah kebijakan yang berasal dan dikeluarkan oleh

---

<sup>16</sup>Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).h.273

<sup>17</sup>Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Banten: Baraka Aksara, 2013) .h.175-176

pemerintah dengan pihak yang berwenangnya adalah departemen keuangan yang bertugas untuk mengkaji, menganalisis dan mengimplementasikan serta mengevaluasi sejauh mana penerapan kebijakan tersebut mencapai tingkat optimalnya serta solusi apa yang harus diambil jika terdapat hambatan-hambatan yang timbul dari para wajib pajak tersebut.<sup>18</sup>

## **6. Dasar Pengeluaran Pemerintah**

Identitas keseimbangan pendapatan nasional merupakan “sumber legitimasi” pandangan kaum *keynesian* akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari notasi yang sangat sederhana tersebut dengan gamblang dapat ditelaah bahwa kenaikan (penurunan) pengeluaran pemerintah akan menaikkan (menurunkan) pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau terkena kebijakan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai, melainkan harus pula diperhitungkan siapa (masyarakat lapisan mana) yang akan dipekerjakan atau meningkat pendapatannya. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak melemahkan kegiatan pihak swasta.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Irham Fahmi, *Pengantar Politik Ekonomi* (Bandung: Afabeta Cv, 2010).h.131

<sup>19</sup>Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, 161



## **7. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah**

### ***a. Entrepreneur***

Peran pemerintah daerah sebagai *entrepreneur*, adalah merupakan tanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis di daerahnya. Dalam hal ini pemerintah daerah bisa mengembangkan suatu usaha sendiri dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) atau mitra dengan dunia usaha swasta namun kegiatan usahanya tetap dalam pengendalian pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengelola aset-aset pemerintah daerah dengan lebih baik dan ekonomis sehingga mampu memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah.

### ***b. Koordinator***

Pemerintah daerah harus mampu bertindak sebagai koordinator dalam pembangunan ekonomi di daerahnya, yaitu melalui penetapan kebijakan-kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi pembangunan ekonomi yang komprehensif bagi kemajuan daerahnya. Dalam peran ini pemerintah daerah bisa melibatkan kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk proses pengumpulan data dan evaluasi tentang informasi yang berkaitan dengan kondisi perekonomian di daerah.

### ***c. Fasilitator***

Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator dengan cara mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan *attitudinal* (prilaku atau budaya masyarakat) di daerahnya. Hal ini perlu dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan, serta pengaturan penetapan tata ruang daerah (*Zoning*) yang lebih baik.

#### *d. Stimulator*

Pemerintah daerah dapat berperan sebagai stimulator dalam penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang dapat mempengaruhi dunia usaha untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap eksis berada di daerah tersebut. Simultan ini dapat dilakukan antara lain dengan pembuatan brosur-brosur, pembangunan kawasan industri, pembuatan *outlets* untuk produk-produk UKM, membantu UKM melakukan pameran, dan sebagainya.<sup>20</sup>

Pada dasarnya peranan pemerintah dalam perekonomian yang Islami, memiliki dasar rasionalitas yang kokoh. Dalam pandangan Islam, peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi, yaitu:

- a. Derivasi dari konsep kekhalifahan,
- b. Konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif (*fard al-kifayah*) serta
- c. Adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan *falah*.

Pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan (*al-adl wal ihsan*) serata tata kehidupan yang baik (*hayyah thayyibah*) bagi seluruh umat.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Subandi, *Ekonomi Pembangunan* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 143-144

<sup>21</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) h.446

## B. Pertumbuhan Ekonomi

### 1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut schumpeter pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan hebat yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk.<sup>22</sup> Dalam pengertian lain pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai: perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat, kemampuan yang meningkat disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya.<sup>23</sup> Proses pertumbuhan ekonomi sebagai suatu fungsi tujuan pada akhirnya harus tunduk terhadap fungsi kendala yaitu keterbatasan sumber daya ekonomi itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi akan mulai mengalami perlambatan jika daya dukung alam tidak mampu lagi mengimbangi aktivitas ekonomi yang ada.<sup>24</sup>

Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu dengan menggunakan rumus:

$$G_t = \frac{(PDBR_t - PDBR_{t-1})}{PDBR_{t-1}} \times 100\%$$

<sup>22</sup>Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Kencana, 2015).h.78

<sup>23</sup>Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) h.9

<sup>24</sup>Subandi, *Ekonomi Pembangunan*,.....45

Di mana:

$G$  = Pertumbuhan Ekonomi periode  $t$  (triwulanan atau tahunan).

$PDBR_t$  = PDB Riil periode  $t$  (berdasarkan harga konstan).

$PDBR_{t-1}$  = PDB Riil periode sebelumnya<sup>25</sup>

Selain pertumbuhan ekonomi yang telah dijelaskan di atas ada juga pertumbuhan ekonomi dalam Islam, beberapa ahli ekonomi maupun ahli fikih yang memberikan perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan bahwa maksud pertumbuhan bukan hanya aktivitas produksi saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditunjukkan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spiritual manusia.

Penekanan di sini ialah bahwa pertumbuhan ekonomi telah ada dalam wacana pemikiran Muslim klasik, yang dibahas dalam “Pemakmuran Bumi” yang merupakan pemahaman dari firman Allah QS. Hud [11] ayat 61:

*“... Dia yang menjadikan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya...”*

Terminologi “pemakmuran tanah” mengandung pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib kepada seorang gubernurnya di Mesir:

---

<sup>25</sup> Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro* (Banten: Baraka Aksara, 2013) h.80

*“Hendaklah kamu memperhatikan kemakmuran tanah dengan perhatian yang lebih besar daripada orientasi pemungutan pajak, karena pajak sendiri hanya dapat dioptimalkan dengan memakmurkan tanah. Barang siapa yang memungut pajak tanpa memperhatikan pemakmuran tanah, negara tersebut akan hancur.”<sup>26</sup>*

## **2. Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh ketersediaan faktor-faktor produksi dalam suatu negara. Konsep-konsep dasar ekonomi mikro dalam teori produksi dapat dijadikan landasan untuk melihat faktor-faktor penentu dalam pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan konsep mikro dalam teori produksi, jumlah *output* sangat ditentukan oleh *input-input* yang terlibat dalam proses produksi. *Input* adalah faktor produksi yang terlibat dalam proses produksi. Secara umum faktor produksi tersebut dapat berupa sumber daya alam (tanah atau lahan, sinar matahari dan lain-lain), barang modal (berupa barang, mesin atau uang), tenaga kerja dan keahlian (*managerial skill* atau *technical skill*).<sup>27</sup>

## **3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi**

Ada empat faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat (negara) yaitu:

- a. Akumulasi modal, termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fisik (mesin-mesin), dan sumber daya manusia (*human resources*)

---

<sup>26</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Kencana, 2015), h.124-125

<sup>27</sup> Asfia Murni, *Ekonomika Makro* (Bandung: Retika Aditama, 2013), h.28

- b. Pertumbuhan penduduk
- c. Kemajuan teknologi
- d. Sumber daya institusi (sistem kelembagaan)

1) Akumulasi Modal

Akumulasi modal akan terjadi jika ada bagian dari pendapatan pada masa sekarang yang ditabung kemudian diinvestasikan untuk dapat memperbesar *output* pada masa yang akan datang.

2) Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (*labor force*) secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut berarti : (1) semakin banyak jumlah angkatan kerja berarti semakin banyak pasokan tenaga kerja, dan (2) semakin banyak jumlah penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik. Dalam memahami dua faktor fundamental pertama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi, untuk sementara kita sisihkan komponen ke tiga ( teknologi ). Marilah lihat kedua faktor itu berinteraksi melalui kurva kemungkinan produksi atau *production possibility curve (PPC)*. Dengan teknologi, sumber daya fisik, dan sumber daya manusia tertentu, PPC menggambarkan kombinasi-kombinasi *output* maksimum yang dapat dicapai untuk dua kelompok komoditas, misalkan beras dan radio, jika sumberdaya yang ada digunakan secara penuh dan efisien.

3) Kemajuan Teknologi

Menurut para ekonom, kemajuan teknologi merupakan faktor yang paling penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam bentuknya

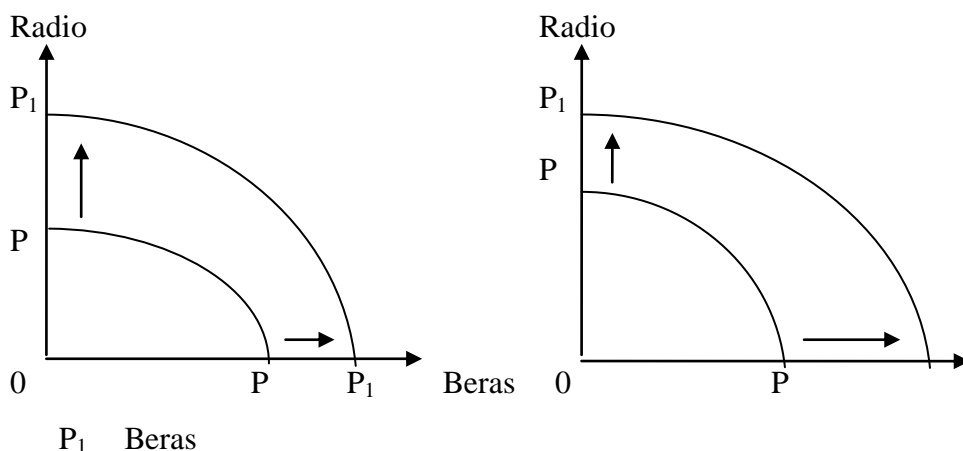
yang paling sederhana, kemajuan teknologi disebabkan oleh adanya cara-cara baru atau mungkin cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional, seperti cara menanam padi, membuat pakaian, atau membangun rumah. Ada tiga macam klasifikasi mengenai kemajuan teknologi yaitu: (1) kemajuan teknologi yang bersifat netral, (2) kemajuan teknologi yang bersifat menghemat tenaga kerja (*labor saving*), dan (3) kemajuan teknologi yang bersifat menghemat modal (*capital saving*).

### Gambar 2.1

#### Pergeseran PPC Yang Non-Simetris

(a) Hanya Stok Modal Yang Diperluas (b) Hanya ada kenaikan pada Kuantitas

dan Kualitas Tanah

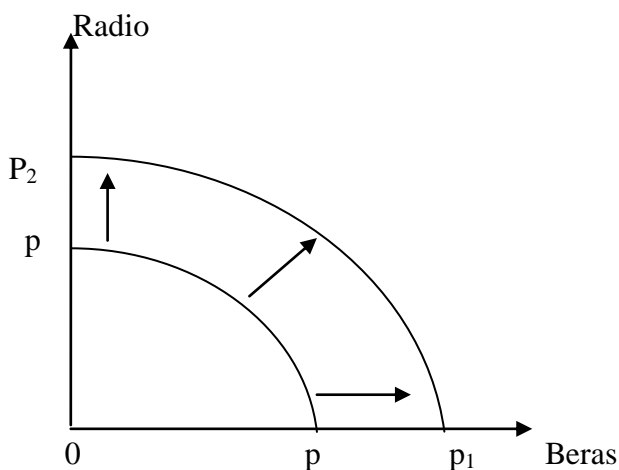


Suatu kemajuan teknologi dikatakan mempunyai sifat yang netral jika tingkat *output* yang di capai lebih tinggi dari kuantitas dan kombinasi *input* yang sama. Inovasi-inovasi yang timbul dari adanya pembagian kerja (*division of labor*) yang tepat akan

menghasilkan tingkat *output* total yang lebih tinggi dan konsumsi yang lebih banyak untuk semua orang. Dalam hubungannya dengan analisis kemungkinan produksi (PPC), kemajuan teknologi dikatakan mempunyai sifat yang netral jika *output* total mengalami kenaikan sebesar dua kali pada saat semua *input* produktifnya dikalikan dua. Adanya pergeseran pada kurva PPC yang menjauhi titik asal tersebut ditunjukkan oleh Gambar 2.2.

**Gambar 2.2**

Kemajuan teknologi yang Bersifat Netral



Di sisi lain, kemajuan teknologi dapat pula bersifat menghemat tenaga kerja (di mana *output* yang lebih tinggi dapat dicapai dengan jumlah tenaga kerja yang sama) atau menghemat modal (di mana *output* yang lebih tinggi dapat di capai dengan *input* modal yang sama).



#### 4) Sumberdaya Instituisi (Sistem Kelembagaan)

Menurut Douglas C. North (1991) – pemenang Nobel Ekonomi 1993 – anggapan sebagian besar ekonom arus utama (*mainstream*) selama ini bahwa mekanisme pasar merupakan penggerak utama perekonomian dan menafikkan peran instituisi adalah keliru. Menurut North peran instituisi dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sangat sentral. Pengertian instituisi yang dimaksudkan oleh North (1991) adalah aturan-aturan yang mengatur interaksi politik, ekonomi, dan sosial. Instituisi terdiri dari aturan informal (adat istiadat, transaksi, norma sosial, dan agama) dan aturan formal (konstitusi, undang-undang, peraturan-peraturan, dan hak kepemilikan).<sup>28</sup>

#### 4. Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi

Kepeloporan Simon Kuznets, sebagai peraih nobel ekonomi pada tahun 1971, mempelopori dalam mengukur dan menganalisis sejarah pertumbuhan pendapatan nasional negara-negara maju. Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai “peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya; pertumbuhan kemampuan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan kelembagaan; serta menyesuaikan ideologi yang dibutuhkan-nya”. Ketiga komponen tersebut sangat penting karena:

1. Kenaikan *output* nasional secara terus menerus merupakan perwujudan dari pertumbuhan ekonomi dan kemampuan untuk

---

<sup>28</sup>Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010) h. 270-273

menyediakan berbagai macam barang ekonomi merupakan tanda kematangan ekonomi;

2. Kemajuan teknologi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, namun belum merupakan syarat yang cukup. Maka yang merealisasikan potensi pertumbuhan yang terkandung dalam teknologi baru.
3. Perlu melakukan penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi. Maka inovasi teknologi harus disertai inovasi sosial, sebab bila tidak akan seperti lampu tanpa aliran listrik, artinya untuk terwujudnya potensi harus ada *input*-nya.<sup>29</sup>


Selain itu ada juga karakteristik dalam Islam yang dikemukakan oleh Tarqi menguraikan mengenai beberapa karakteristik dalam pertumbuhan ekonomi Islam, sebagai berikut:

#### 1. Serba Meliputi

Islam melihat bahwa pertumbuhan lebih dari sekedar materi dan memiliki tujuan yang lebih universal dibandingkan dengan orientalis terbatas yang ingin dicapai oleh sistem-sistem kontemporer yaitu untuk menciptakan keadilan sosial.

#### 2. Berimbang

Pertumbuhan ekonomi Islam tidak hanya diorientasikan untuk menciptakan pertambahan produksi, namun ditujukan berlandaskan keadilan distribusi sesuai dengan firman Allah QS. *Al-Maaidah* [5]:8 :

ط  
 ”.... أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ....”

---

<sup>29</sup>Subandi, *Ekonomi Pembangunan*..... 69

*“...Berbuat adilah kamu sesungguhnya hal itu yang paling dekat dengan ketaatan...”*

Keadilan dilakukan dengan memberlakukan kebaikan bagi semua manusia dalam kondisi apa pun. Tujuan pertumbuhan ekonomi dalam Islam yaitu adanya kesempatan semua anggota masyarakat untuk mendapatkan kecukupan, bukan kekurangan.

### 3. Realistis

Realistis adalah suatu pandangan terhadap permasalahan sesuai kenyataan. Sifat realistis dalam bidang pertumbuhan ekonomi menjelaskan bahwa Islam melihat persoalan ekonomi dan sosial yang mungkin terjadi di masyarakat Islam dengan tawaran solusi yang juga realistis.

### 4. Keadilan

Islam dalam menegakkan hukum-hukumnya didasarkan atas landasan keadilan di antara manusia. Allah telah memerintahkan untuk berbuat adil dalam banyak ayat Al-Qur'an. Allah berfirman dalam QS. *An-Nahl* [16] ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

*Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu mendapat pelajaran.”*

## 5. Beranggung Jawab

Landasan adanya tanggung jawab sebagai salah satu fondasi paling penting diungkapkan secara jelas dan gamblang dalam syarat Islam. Jika mengikuti syariat ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa adanya tanggung jawabada dua sisi:

- a. Tanggung jawab antara sebagian anggota masyarakat dan sebagian golongan lainnya.
- b. Tanggung jawab negara terhadap masyarakat

## 6. Mencukupi

Islam tidak hanya menetapkan adanya karakteristik tanggung jawab, namun tanggung jawab itu haruslah mutlak dan mampu mencakup realisasi kecukupan bagi semua manusia.

## 7. Berfokus pada Manusia

Karakter ini sesuai dengan posisi manusia yang merupakan duta Allah di muka bumi dan inilah yang mencirikan tujuan dan pengaruh pertumbuhan ekonomi dalam Islam.<sup>30</sup>

### **C. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data statistik yang merangkum perolehan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi disuatu wilayah pada satu periode tertentu. PDRB dihitung dalam dua cara, yaitu atas dasar harga berlaku dan

---

<sup>30</sup>Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*(Jakarta: Kencana,2015) h. 126-127

atas dasar harga konstan. Dalam menghitung PDRB atas dasar harga berlaku menggunakan harga barang dan jasa tahun berjalan, sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga pada suatu tahun tertentu (tahun dasar). Penghitungan PDRB saat ini menggunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar. Penggunaan tahun dasar ini ditetapkan secara nasional.

Dari dua penyajian PDRB di peroleh beberapa indikator ekonomi makro yang banyak digunakan oleh berbagai kalangan, baik oleh birokrat pemerintah, peneliti maupun masyarakat dunia usaha. Indikator tersebut antara lain Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Struktur Perekonomian, Pendapatan Perkapita, Indeks Harga Implisit dan Inflasi.<sup>31</sup>

#### **D. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

**Tabel 2.1**

Beberapa contoh Skripsi Terdahulu yang memang ada sedikit persamaan dengan judul yang akan di teliti oleh penulis yaitu sebagai berikut:

No	Nama dan Judul Skripsi	Kesimpulan
1.	Ni Komang Sopianti: “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi dan	Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat

---

<sup>31</sup> BPS Provinsi Banten

	Upah Minimum terhadap Jumlah Pengangguran Di Bali”	inflasi dan upah minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran di Bali. Variabel tingkat inflasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran di Bali, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan upah minimum secara parsial tidak berpengaruh terhadap jumlah pengangguran di Bali. Variabel dominan dalam penelitian ini adalah tingkat inflasi, dimana 26 persen secara positif mempengaruhi jumlah pengangguran di Bali. Variasi pengaruh dari ketiga variabel bebas dapat diketahui berdasarkan dari nilai $R^2$ yang senilai 0,308. Jadi, 30,8 persen variasi jumlah pengangguran dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan
--	--	--

		<p>upah minimum, sedangkan sisanya sebesar 69,9 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan kedalam model seperti pertumbuhan penduduk, kesehatan, pendidikan, kondisi geografis, jenis kelamin, dan urbanisasi.</p>
2.	<p>Umdatul Husna</p> <p>“Pengaruh Pdrb, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Kota Se Jawa Tengah”</p>	<p>Hasil penelitian yang diperoleh dengan program Eviews 7 bahwa nilai sebesar 0,669109 menunjukkan variabel PAD dapat dijelaskan oleh variabel PDRB, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah sebesar 66,9 persen. Aktivitas perekonomian di Daerah Kota Se Jawa Tengah berkembang dengan baik, sehingga PAD dapat meningkat melalui penarikan pajak.</p>
3.	<p>Norista Gathama Putra:</p> <p>“Pengaruh Belanja Modal dan</p>	<p>Hasil dari estimasi yang diperoleh menunjukkan bahwa</p>

	Belanja Operasi Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah”	variabel rasio belanja modal memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0108 lebih kecil dari nilai $\alpha$ 5% serta koefisien sebesar 7,2382, hal ini berarti variabel rasio belanja modal memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada 35 kabupaten/kota di provinsi jawa tengah. Begitu juga dengan variabel rasio belanja operasi yang memiliki probabilitas sebesar 0,0128 lebih kecil dari nilai $\alpha$ 5% serta koefisien sebesar 3,7010, hal ini berarti variabel rasio belanja operasi memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada 35 kabupaten/kota di provinsi jawa tengah. Pada taraf kepercayaan yang sama yaitu sebesar 95%,
--	--	---



		<p>terlihat dari efek belanja modal lebih besar dari pada belanja oprasi, jadi sebagai implikasi kebijakan yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah lebih memfokuskan pada penggunaan instrumen belanja modal untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi.</p>
--	--	--

### **E. Hipotesis**

Hipotesis adalah pernyataan yang didefinisikan dengan baik mengenai karakteristik populasi. Ada dua macam hipotesis yang dibuat dalam suatu percobaan penelitian, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif sering disebut juga hipotesis penelitian. Hipotesis nol adalah hipotesis yang akan diterima kecuali bahwa data yang kita kumpulkan salah. Hipotesis alternatif akan diterima hanya jika data yang kita kumpulkan mendukungnya.

Biasanya hipotesis nol dilambangkan dengan  $H_0$  dan hipotesis alternatif dengan  $H_a$ . Dalam suatu study, sering pernyataan hipotesis nol berlawanan dengan apa yang sedang kita

teliti.<sup>32</sup>Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

(H<sub>0</sub>): tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Banten

(H<sub>a</sub>):terdapat pengaruh yang signifikan antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Banten

---

<sup>32</sup>Ety Rochaety DKK, *Metodologi Penelitian Bisnis Dengan Aplikasi SPSS* (Jakarta:Mitra Wacana Media, 2007), h.104

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini dilakukan kurang lebih 1 semester ( 6 Bulan ). Penulis memilih judul Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten. Oleh karena itu peneliti memilih penelitian bertempat di Provinsi Banten, dan mengambil data dari “*BPS Provinsi Banten*” sebagai tempat yang menyimpan data-data mengenai Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Banten dan letak dari tempat peneliti masih bisa terjangkau dengan menggunakan kendaraan bermotor.

#### **B. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi juga dapat diartikan sebagai tempat terjadinya masalah yang kita selidiki.

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah data data mengenai pengeluaran pemerintah dan data tentang pertumbuhan ekonomi Banten. Dimana tempat untuk mencari data tersebut adalah di BPS Provinsi Banten yang berada di JL. Raya Palima, Kav. H1-2, KP3B, Pakupatan, Serang, 42171, mengenai pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi PDRB di Provinsi Banten.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Syarat utama sampel ialah harus mewakili populasi. Oleh karena itu, semua ciri-ciri populasi harus diwakili dalam sampel.

Pengambilan sampel perlu dilakukan mengingat jumlah populasi yang tak mungkin bila dijadikan sampel secara keseluruhan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini dititik beratkan pada analisis pengeluaran pemerintah perhadap pertumbuhan ekonomi Banten. Data yang digunakan adalah data dari tahun 2007-2014 data tersebut diambil dari Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.

### **C. Jenis Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Dimana penelitian deskriptif ini melakukan analisa hanya sampai pada taraf deskripsi (pengamatan), yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.<sup>33</sup>

Sedangkan pendekatan yang dimaksud ialah penelitian kuantitatif. Dalam pendekatan kuantitatif ini , yang penulis lakukan ialah melalui pencarian data mengenai Analisis Pengeluaran Pemerintah (variabel X) dan Pertumbuhan Ekonomi (variabel Y).

---

<sup>33</sup> Azwar Saifuddin. *Metode Penelitian*. (yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2011).h.6-7

#### D. Oprasional Variabel Penelitian

Pengukuran efektifitas pengeluaran pemerintah yang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Banten. Variabel ini meliputi satu variabel independen (X) yaitu pengeluaran pemerintah, dan satu variabel dependen (Y) yaitu pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 3.1**  
**Oprasional Variabel Penelitian**

Variabel	Definisi variabel	Indikator
Pengeluaran Pemerintah (X)	Pengeluaran pemerintah adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. <sup>34</sup>	Masyarakat dapat merasakan fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pihak pemerintah dalam anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.
Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Pertumbuhan adalah suatu proses kenaikan, kemajuan, atau penambahan. Sedangkan Ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari tentang aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi,	Semakin tinggi pengeluaran pemerintah maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonominya dan semakin rendah pengeluaran pemerintahnya maka

---

<sup>34</sup> Tommy Prio Haryanto, Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011(*Jurnal ekonomi pembangunan*),EDAJ 2

	distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa.	pertumbuhan ekonominya pun akan rendah.
--	--	---

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data sekunder yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Ketetapan dan kecermatan informasi mengenai subjek dan variabel penelitian tergantung pada strategi dan alat pengambilan data yang dipergunakan.<sup>35</sup> Penulis menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kajian perpustakaan, seperti buku-buku dan penulis menggunakan data dari situs Badan Pusat Statistik Provinsi Banten ([www.bpsbanten.go.id](http://www.bpsbanten.go.id)), juga data yang ada pada Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. Adapun instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersangkutan dengan masalah penelitian ini dengan dokumentasi (riset kepustakaan).

Pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu dengan cara menyalin atau dengan cara mengumpulkan data atau dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Selain itu peneliti juga menggunakan referensi-referensi atau buku-buku sebagai rujukan yang dapat dipercaya kebenarannya. Peneliti juga mengumpulkan data dengan cara oservasi atau pengamatan yaitu kegiatan pemuatan

---

<sup>35</sup>Azwar saifuddin, *Metode Penelitian.....* 36

perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Observasi ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung, mengamati dan mencatat pada objek penelitian.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah ukuran seberapa tepat instrumen itu mampu menghasilkan data sesuai dengan ukuran yang sesungguhnya yang ingin diukur.<sup>36</sup>Jadi alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara pengumpulan data. Adapun instrumen penelitian variabel X ( Pengeluaran Pemerintah ) dan variabel Y ( Pertumbuhan Ekonomi ) yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data lapangan adalah menggunakan data sekunder.

#### **G. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data adalah bentuk pengolahan terhadap data untuk membuat data itu berguna sesuai dengan hasil yang diinginkan agar dapat digunakan. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penghitungan komputasi program SPSS ( *Statistical Product and Service Solution* ) 16.0, karena program ini memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi

---

<sup>36</sup> S.Nasution, metodologi Reasearch Penelitian Ilmiah,(Jakarta:Bumi Aksara,2003),.H.143

serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog sederhana sehingga lebih mudah dipahami cara pengoperasiannya.

## H. Teknik Analisis Data

### 1. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen, atau keduanya berdistribusi normal, mendekati atau tidak.<sup>37</sup> Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan *kolmogorof-smirnov*, dengan kriteria pengujian adalah:

- 1) Angka signifikansi uji kolmogorof-smirnov sig. > 0.05, menunjukkan data berdistribusi normal.
- 2) Angka signifikansi uji kolmogorof-smirnov sig. < 0.05, menunjukkan data tidak berdistribusi normal.<sup>38</sup>

#### b. Uji autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antar anggota observasi yang disusun menurut waktu atau tempat. Model regresi yang baik

---

<sup>37</sup>Husein Umar, *Desain Penelitian Akutansi Keprilakuan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2008).h.77

<sup>38</sup>Haryadi Sarjono dan winda julianita, *SPSS vs LISREL sebuah pengantar aplikasi untuk riset*,( Jakarta: Salemba Empat,2011).h.67



seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji Durbin Watson (DW test)<sup>39</sup>

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas yaitu adanya ketidak samaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi.

2. Analisis Regresi Linier Sederhana

Regresi linier mengestimasi besarnya koefisien-koefisien yang dihasilkan dari persamaan yang bersifat linier, yang melibatkan satu variabel bebas sebagai alat prediksi besarnya nilai variabel terikat.<sup>40</sup>

Regresi linier sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kasual satu variabel independen (x) dengan variabel dependen (y).

3. Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel X dan Y. Angka koefisien yang dihasilkan dalam uji ini berguna untuk menunjukkan kuat lemahnya hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

---

<sup>39</sup>Haryadi Sarjono, Winda Julianita, *SPSS vs LISREL sebuah pengantar aplikasi untuk riset* , , 80-84

<sup>40</sup>Ety Rochaety DKK, *Metodologi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007)h.131

Berikut pedoman koefisien korelasi.<sup>41</sup>

**Tabel 3.2**  
**Pedoman Koefisien Korelasi**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0.00-0.199	Sangat Rendah
0.20-0.399	Rendah
0.40-0.599	Sedang
0.60-0.799	Kuat
0.80-1000	Sangat Kuat

#### 4. Uji Normalitas

Uji normalitas yang paling sederhana adalah memuat grafik distribusi frekuensi atas sektor yang ada. Mengingat kesederhanaan tersebut, maka pengujian kenormalan data sangat tergantung pada kemampuan mata dalam mencermati *plotting* data. Jika jumlah data cukup banyak dan penyearan tidak 100% normal (tidak normal sempurna), maka kesimpulan yang ditarik berkemungkinan salah.<sup>42</sup> Seperti dikemukakan di muka bahwa statistik parametris itu bekerja berdasarkan asumsi bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis berdistribusi normal. Untuk itu sebelum peneliti menggunakan

---

<sup>41</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendejatan Kuantitatif, Kualitatif, 184.*

<sup>42</sup> Agus Irianto, *Statistik Konsep Dasar, Aplikasi, dan Pengemangannya* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group: 2004), h.272

teknik statistik parametris, maka kenormalan data harus diuji terlebih dahulu.<sup>43</sup>

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data bersekala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametric, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika data tidak berdistribusi normal, maka metode alternatif yang digunakan adalah statistik non parametrik.

#### 5. Uji Determinasi ( $R^2$ )

Uji determinasi diberi notasi dengan  $r^2$ . Uji determinasi menunjukkan besarnya sumbangan variabel bebas ke dalam variabel terikat. Indek hitung dengan cara mengakuratkan  $r$  yang dihitung menggunakan rumus *r product moment*.<sup>44</sup>

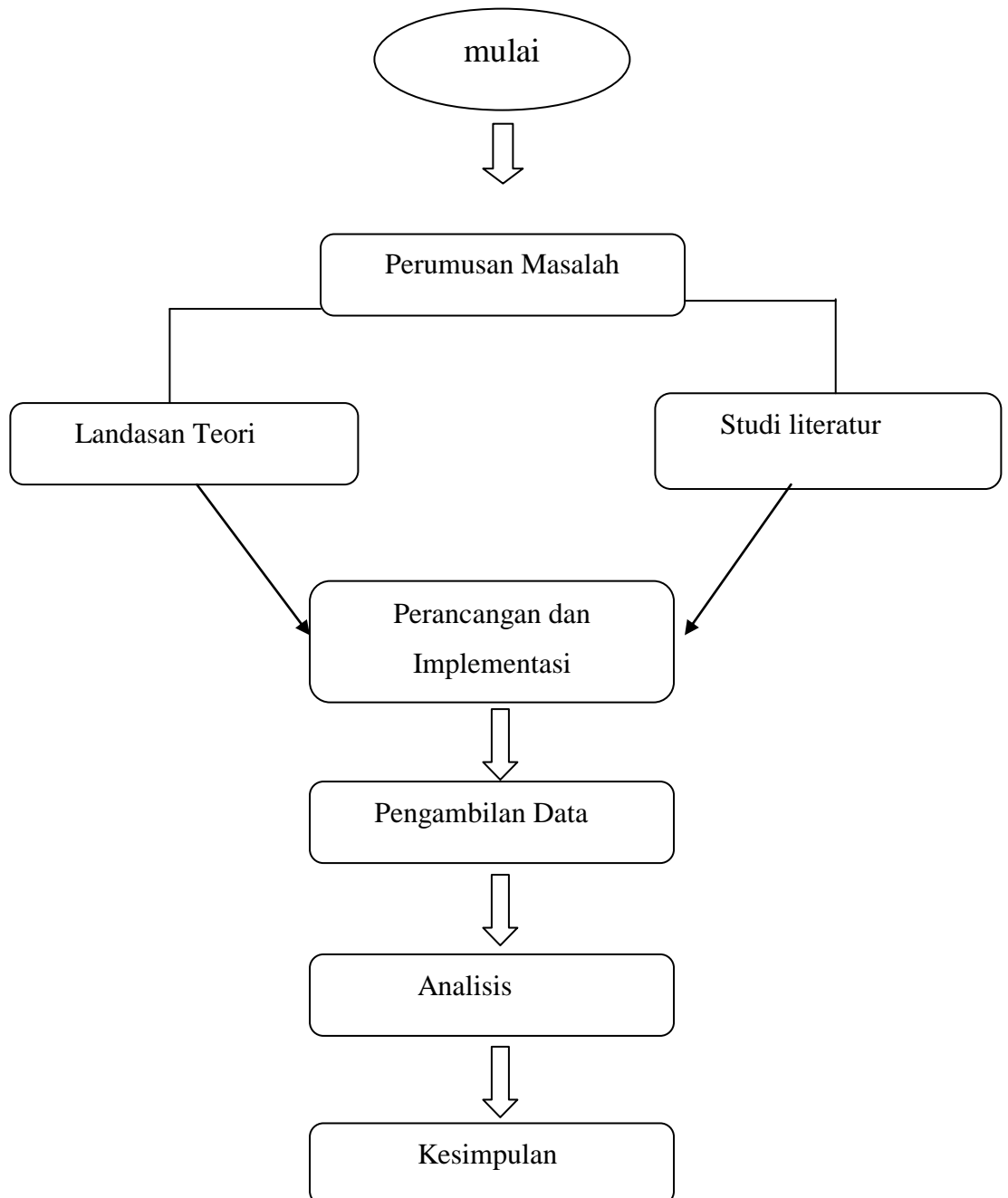
---

<sup>43</sup>Sugiono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung, Alfabeta CV: 2007), h.74

<sup>44</sup>Purwanto, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi dan Pendidikan* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 293

## I. Alur Penelitian

**Gambar 3.1**







## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Perkembangan Perekonomian Provinsi Banten**

Provinsi Banten adalah salah satu daerah pemekaran yang dulu termasuk dalam wilayah Karesi-denan Banten - Provinsi Jawa Barat dan terbentuk melalui Undang-undang No.23 Tahun 2000. Secara geografis, Provinsi Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa dan berjarak sekitar 90 km dari DKI Jakarta serta memiliki luas sebesar 9.662,92 km<sup>2</sup> atau sekitar 0,51 persen dari luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayahnya, berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat di sebelah timur, Laut Jawa di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, dan Selat Sunda di sebelah barat.

Secara astronomis, wilayah Provinsi Banten terletak pada 507'50" - 701'1" Lintang Selatan dan 10501'11" - 10607'12" Bujur Timur.<sup>45</sup> Pembangunan wilayah bertujuan untuk meningkatkan daya saing wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi timpangan antar wilayah, serta menjadikan setiap harapan setiap daerah Indonesia. Pembangunan wilayah selain meningkatkan daya saing wilayah juga mengupayakan keseimbangan pembangunan antar daerah sesuai dengan potensinya masing-masing. Perkembangan indikator utama dalam pembangunan wilayah meliputi pertumbuhan ekonomi,

---

<sup>45</sup> Sumber: BPS Provinsi Banten

pengurangan penganggurana, dan pengurangan kemiskinan dapat menggambarkan campur kinerja pembangunan secara umum.

Kinerja perekonomian Provinsi Banten selama tahun 2012-2014 berfluktuatif dan memiliki kecendrungan menurun. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode tersebut sebesar 6,6 persen lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional sebesar 5,90.

Kinerja pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dari besarnya PDRB perkapita di Banten selama kurun waktu 2010-2014 cenderung meningkat, yang menunjukkan meningkatnya tingkat kesejahteraan di Provinsi ini walaupun berada dari rata-rata nasional pada periode tersebut. Jika pada tahun 2010 rasio antara PDRB perkapita Banten dan PDB nasional sebesar 88,25 persen, maka pada tahun 2014 rasionya menurun menjadi 87,13 persen.

Hal tersebut menunjukkan mengenai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan landasan ekonomi daerah yang memperluas kesempatan kerja dan mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Analisis pembangunan wilayah provinsi banten 2015



## B. Pembahasan Hasil Penelitian

Untuk mengetahui pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, penulis menyajikan data dari tahun 2007-2014 dalam bentuk tabel dibawah ini.

**Tabel 4.1**

Data Pengeluaran Pemerintah Provinsi Banten  
( Belanja langsung dan Belanja tidak langsung ) (X)

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten ( persen )
1	2007	1.867.399,38
2	2008	2.253.982,71
3	2009	2.420.828,80
4	2010	2.834.570,53
5	2011	3.901.218,11
6	2012	5.317.735,49
7	2013	5.295.139,15
8	2014	6.192.155,57

Data tersebut diperoleh dari situs BPS Provinsi Banten dari tahun 2007-2014 dimana pada setiap tahunnya pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai analisis pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Banten.

**Tabel 4.2**Data Pertumbuhan Ekonomi banten tahun 2007-2014 (Y)<sup>47</sup>

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten ( persen )
1	2007	6,04 %
2	2008	5,77 %
3	2009	4,71 %
4	2010	6,11 %
5	2011	6,38 %
6	2012	6,15 %
7	2013	5,86 %
8	2014	5,47 %

Data pertumbuhan ekonomi tersebut diperoleh dari BPS Provinsi Banten dari tahun 2007-2014 dengan menggunakan data pertahun. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai analisis pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Banten.

### C. Analisis Data

Seperti yang telah diuraikan diatas mengenai pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, untuk menganalisis variabel-variabel tersebut akan digunakan metode statistik. Metode tersebut digunakan untuk mempermudah dalam menghitung dan mengelola

---

<sup>47</sup> Sumber: *BPS Provinsi Banten*

data yang ada, untuk membantu pengelolaan data tersebut digunakan program SPSS ver 16.0

### 1. Uji Asumsi Klasik

Adapun langkah untuk menguji asumsi klasik yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### a. Uji Normalitas Data

Normalitas data ini dapat diketahui melalui tabel di bawah ini:

**Tabel 4.3**  
**Uji Normalitas Data**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		x	y
N		8	7
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	3.7604E6	5.8600
	Std. Deviation	1.65695E6	.54467
Most Extreme Differences	Absolute	.212	.292
	Positive	.212	.170
	Negative	-.198	-.292
Kolmogorov-Smirnov Z		.599	.771
Asymp. Sig. (2-tailed)		.865	.591
a. Test distribution is Normal.			

Berdasarkan hasil software SPSS versi 16.0 di atas menunjukkan bahwa nilai asymp sig (2-tailed) x= 0,865, dan y= 0,591 dapat disimpulkan bahwa data tersebut sudah berdistribusi normal karena data tersebut nilainya lebih dari 0,05.

b. Uji Autokorelasi

**Tabel 4.4**  
**Uji Durbin Watson metode GLS**  
**Model Summary<sup>p</sup>**

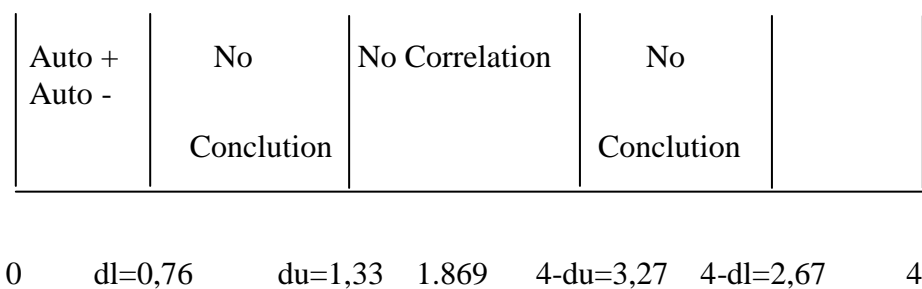
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.112 <sup>a</sup>	.013	-.152	.56110	1.869

a. Predictors: (Constant), x

b. Dependent Variable: y

Nilai Durbin Watson pada model summary adalah 1.869. jadi karena 1.869 berada diantara du dan 4-du maka tidak terjadi autokorelasi.

**Gambar 4.1**  
**Hasil autokorelasi**

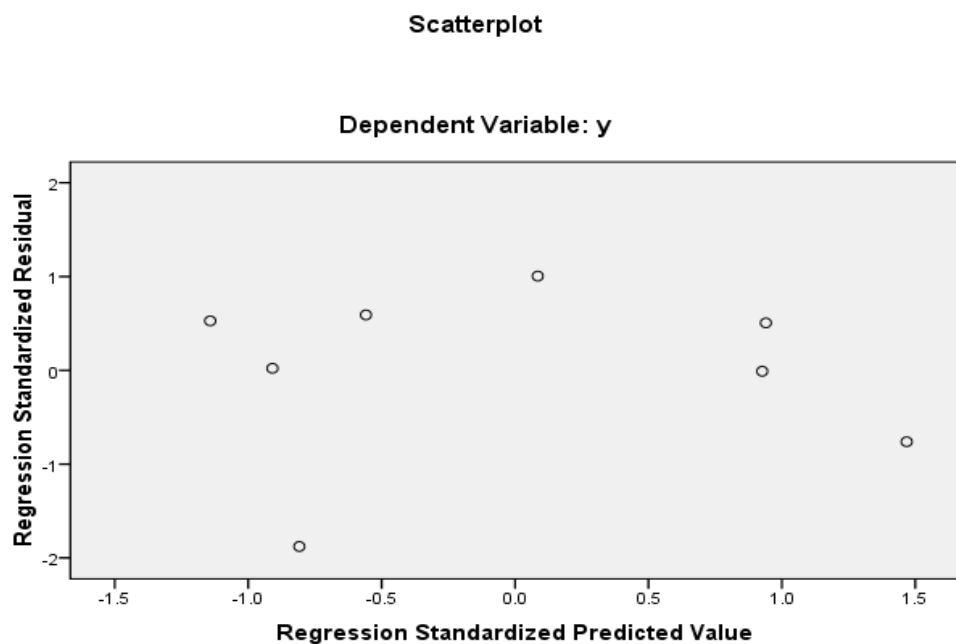


Nilai durbin watson pada model summary adalah sebesar 1,869, nilai tersebut dibandingkan nilai tabel dengan menggunakan taraf signifikansi 5%, jumlah sampel 8 (n) dan

jumlah variabel independen 1 ( $k=1$ ). Nilai durbin watson pada model summary adalah sebesar 1,869, di mana angka yang dihasilkan berada di antara du dan 4-du. Jadi, dapat disimpulkan persamaan regresi terbatas dari masalah atau tidak ada autokorelasi.

c. Uji Heterokedastisitas

**Tabael 4.5**  
**Tabel Scatterplot**



Dari hasil output spss diatas didapatkan titik-titik menyebar, dan tidak memiliki pola yang teratur, jadi kesimpulannya validitas bebas diatas tidak terjadi heterokedastisitas atau bersifat homoskedastisitas. Dilihat dari pola gambar Scatterplot model tersebut.

## 2. Uji Analisis Regresi Linier Sederhana

**Tabel 4.6**  
**Analisis Regresi**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.678	.521		10.907	.000		
X	3.540E-8	.000	.112	.277	.791	1.000	1.000

a. Dependent Variable: y

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Konstanta sebesar 5.678 artinya jika pengeluaran pemerintah (x) nilainya adalah nol, maka pertumbuhan ekonomi (y) adalah 5.678.
2. Koefisien regresi pengeluaran pemerintah (x) sebesar 3,540 artinya jika pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan 1% maka tingkat pertumbuhan ekonomi 3,540%.

### 3. Uji Koefisien Korelasi

**Tabel 4.7**  
**Uji koefisien korelasi**

**Model Summary<sup>a</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.112 <sup>a</sup>	.013	-.152	.56110	1.869

a. Predictors: (Constant), x

b. Dependent Variable: y

Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa koefisien korelasi (r) 0,112 bahwa hubungan antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah “Sangat Rendah”.

### 4. Uji Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 4.8**  
**Determinasi**

**Model Summary<sup>a</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.112 <sup>a</sup>	.013	-.152	.56110	1.869

a. Predictors: (Constant), x

b. Dependent Variable: y

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa nilai R Squer koefisien determinasi ( $r^2$ ) adalah sebesar -0,152 berarti pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif sebesar 0,152.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara pengeruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi banten. Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan software SPSS versi 16.0 dapat diketahui bahwa koefisien korelasi ( $r$ ) 0,112 bahwa hubungan antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah “Sangat Rendah”.
2. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan software SPSS versi 16.0 didapatkan nilai ( $r^2$ ) sebesar -0,152 berarti pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif yaitu sebesar 15,2% dan sisanya di pengaruhi oleh faktor lain.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dari skripsi ini. Maka penulis memberikan beberapa saran antara lain:

1. Hendaknya bagi para pemerintah mebangunan suatu wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing wilayah lain, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi timpangan antar wilayah, serta menjadikan setiap harapan setiap daerah indonesia.

2. Hendaknya bagi pemerintah daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan landasan ekonomi daerah yang memperluas kesempatan kerja dan mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.